

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi negara-negara berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia, adalah kemiskinan. Para ahli di bidang ekonomi berpendapat bahwa kemiskinan di Indonesia mempunyai banyak segi (Arsyad, 2010). Kemiskinan dengan beberapa dimensi dapat dilihat dari sudut pandang primer dan sekunder. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan, lemahnya organisasi sosial politik, dan kurangnya aset menjadi faktor utamanya. Sementara itu, faktor sekundernya adalah kurangnya akses jaringan sosial, keterbatasan sumber daya keuangan, dan kurangnya pengetahuan. Masalah masyarakat ini menjadi perhatian nasional, khususnya di Kota Cirebon, dan dapat menghambat kemajuan negara. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan Program Keluarga Berencana untuk mengatasi kepadatan penduduk dengan membatasi jumlah anak menjadi 2, yang perlu ditingkatkan setiap tahun guna mengurangi beban tanggungan perkeluarga seiring dengan peningkatan jumlah penduduk (Idrus, 2018)

Said (2001) mendefinisikan jumlah penduduk “Jumlah individu yang mendiami suatu wilayah pada suatu waktu dan merupakan hasil dari proses demografi seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi,”.

Pada dasarnya, pembangunan nasional adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan potensi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini penting karena pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia relatif cepat, yang mungkin mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi negara ini. Ketidakmerataan pembangunan dapat menyebabkan konsentrasi penduduk di daerah maju seperti Kota Cirebon, yang menjadi pusat pertumbuhan, pemerintahan, perdagangan, industri, dan pendidikan. Beberapa orang meyakini bahwa kota dapat memenuhi semua kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan, yang dapat mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang cepat di wilayah perkotaan.

Urbanisasi juga berperan dalam peningkatan jumlah penduduk di kota, menciptakan variasi kondisi lingkungan (Muspiroh, 2014)

Setiap tahun, populasi suatu wilayah terus bertambah karena kelahiran. Peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi masalah bagi pemerintah jika tidak terkendali, karena pertumbuhan yang terus menerus dapat menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan yang signifikan. Meskipun demikian, pertumbuhan penduduk memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan asalkan masyarakat memiliki akses pekerjaan dan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Pemerintah akan berupaya menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang meningkat (Didu & Fauzi, 2021).

Pertumbuhan penduduk secara umum mempunyai dampak yang menguntungkan dan konstruktif terhadap pembangunan ekonomi baik di negara maju maupun berkembang jika pertumbuhan tersebut terjadi secara moderat. Pertambahan jumlah orang dapat menghasilkan lebih banyak ide, bakat, dan kreativitas, serta meningkatkan jumlah tenaga ahli, yang pada gilirannya mendukung perkembangan teknologi. Perluasan populasi dipandang bermanfaat dalam jangka panjang. Sudut pandang Simon bahwa perluasan populasi dapat memacu pembangunan ekonomi mendukung sudut pandang ini.

Pertumbuhan penduduk yang tak terkendali menjadi isu fundamental dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Dampaknya mencakup ketidakcapaian tujuan ekonomi, seperti kesejahteraan rakyat dan pengurangan tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk bervariasi dari tahun ke tahun, dengan perhatian khusus pada tingginya populasi di Kota Cirebon. Meskipun setiap kota menyediakan akses dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, tingginya jumlah penduduk di Kota Cirebon menjadi sorotan. Berikut adalah data mengenai populasi di Kota Cirebon sebagai berikut:

Tabel 1.1**Jumlah penduduk di Kota Cirebon 2008-2022 :**

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)
2008	304.152
2009	298.995
2010	293.206
2011	295.981
2012	298.825
2013	301.728
2014	304.584
2015	307.494
2016	310.486
2017	313.325
2018	316.277
2019	319.312
2020	322.322
2021	343.667
2022	346.438

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2008 hingga 2022. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan populasi yang stabil selama periode tersebut. Pada khususnya, pergolakan signifikan terjadi antara tahun 2020 dan 2021.

Menurut gagasan Malthus, pertumbuhan penduduk cenderung meningkat lebih cepat dibandingkan ketersediaan pangan; ahli seperti Adam Smith dan Benjamin Franklin telah mendukung teori ini. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya bumi tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang meningkat pesat karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya (Mustika, 2015).

Pembahasan selanjutnya membahas isu yang tak pernah berakhir, yaitu pengangguran. Pengangguran mengacu pada situasi di mana seseorang, setelah mencapai usia tertentu, menganggur dan mencari pekerjaan untuk mendapatkan kompensasi atau tunjangan. Ketidakseimbangan antara jumlah pekerja atau pencari kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia biasanya menjadi penyebab terjadinya kemiskinan ini.

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini mencakup penduduk yang belum pernah bekerja, penduduk yang sudah bekerja namun baru memulai usaha, penduduk yang kesulitan mencari pekerjaan, dan penduduk yang menganggur atau mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran ditentukan dengan mengambil persentase pengangguran terbuka dari total angkatan kerja. Angka pengangguran ini bisa berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (Indriani, 2019).

Soekirno (2006) mendefinisikan pengangguran sebagai Orang-orang yang menjadi bagian dari Pada tingkat tertentu, angkatan kerja secara aktif mencari pekerjaan, namun mereka belum dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan selera mereka. Menurut Irawan (2002), mereka yang secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat yang berlaku dianggap sebagai pengangguran. Suparmoko (2007), sebaliknya, mengartikan pengangguran sebagai suatu keadaan dimana pekerja tidak mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan atau kesukaannya. Ketiga sudut pandang ini mengarah pada kesimpulan bahwa mereka yang aktif mencari pekerjaan yang sesuai dengan gelar dan keahliannya dianggap sebagai pengangguran. Namun, mereka belum bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya karena terbatasnya lapangan pekerjaan.

Menurut perspektif alamiah, tingkat pengangguran merujuk pada tingkat yang alami dan tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, jika tingkat pengangguran berkisar antara 2 dan 3 persen, yang merupakan kisaran tertinggi, hal ini menunjukkan adanya lapangan kerja penuh dalam perekonomian (Sukirno, 2018).

Djohanputro (2006:69) mengartikan pengangguran terbuka sebagai mereka yang ingin bekerja dan secara aktif mencari atau menciptakan lapangan kerja namun belum berhasil melakukannya Tetapi menurut sudut pandang Sri Budhi (dalam Sirait, 2013), baik negara maju maupun berkembang di seluruh dunia bergulat dengan permasalahan pengangguran tenaga kerja. Kemampuan negara-negara kaya untuk menawarkan tunjangan tersebut kepada penduduknya yang tidak memiliki pekerjaan sangat berbeda dengan kemampuan negara-negara berkembang, yang tidak mampu melakukan hal tersebut.

Dibandingkan dengan perubahan distribusi pendapatan yang merugikan masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan pengangguran merupakan permasalahan yang lebih rumit dan signifikan dalam proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Salah satu tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang adalah ketersediaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan populasi karena lambatnya pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, masalah pengangguran di negara-negara tersebut semakin serius dari tahun ke tahun. Bahkan, dalam beberapa negara miskin, tidak hanya jumlah pengangguran yang meningkat, tetapi juga proporsi mereka terhadap total tenaga kerja semakin meningkat (Mohammad, 2015).

Ketidakseimbangan jumlah pekerjaan yang tersedia di suatu lokasi dibandingkan dengan populasi pekerja, atau tidak seimbangnya penawaran dan permintaan pekerjaan, dapat menjadi penyebab pengangguran di suatu negara. Dampaknya adalah kenaikan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Berikut ini adalah tabel informasi mengenai tingkat pengangguran di Kota Cirebon :

Tabel 1.2

Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Cirebon Tahun 2008-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)
2008	8.39
2009	13.32

2010	11.67
2011	10.56
2012	12.5
2013	9.02
2014	11.02
2015	11.28
2016	9.36
2017	9.29
2018	9.07
2019	9.04
2020	10.97
2021	10.53
2022	8.42

Sumber : Open Data

Berdasarkan data tersebut mencerminkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam jumlah penduduk dari tahun 2008 hingga 2022. Terdapat variasi yang tidak konsisten, dengan beberapa tahun mengalami kenaikan yang tajam (seperti pada tahun 2009 dan 2014) dan tahun lain mengalami penurunan (seperti pada tahun 2013 dan 2022).

Dari perspektif makroekonomi, tingginya tingkat pengangguran menjadi isu serius. Konsekuensi dari peningkatan pengangguran mencakup pemborosan sumber daya dan penurunan pendapatan masyarakat. Pengangguran terbuka, yang muncul ketika peluang pekerjaan tidak sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja, menyebabkan peningkatan jumlah pekerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan di perekonomian (Suidah, 2015).

Pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam merancang strategi pembangunan terletak pada efektivitasnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan tingkat pendapatan nasional yang tinggi diperlukan untuk proses pembangunan. Meskipun peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menghilangkan kemiskinan, namun hal tersebut menjadi suatu kebutuhan yang esensial (Istiandari, 2023).

Menurut Pratama kemiskinan bukan hanya berpengaruh terhadap perekonomian negara, akan tetapi juga berpengaruh terhadap masalah sosial serta kestabilan politik dalam negeri. Untuk itu, pemberantasan kemiskinan menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan menurut Debrina Vita Ferezagia, di Indonesia masih banyak provinsi yang memiliki presentase penduduk miskin yang tinggi. Sehingga pemerintah masih harus melakukan pembangunan di daerah yang memerlukan perhatian lebih (Debriyana, 2018).

Negara-negara berkembang di seluruh dunia berjuang melawan kemiskinan, dan Indonesia adalah salah satu negara yang berupaya mencari solusinya. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui kebijakan pemerintah yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui regulasi dan transformasinya menjadi program-program pengentasan kemiskinan. Kemiskinan memiliki dampak negatif yang luas, tidak hanya menciptakan permasalahan sosial, tetapi juga berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menimbulkan beban ekonomi pembangunan yang lebih besar (Mustika, 2015).

Kemiskinan melibatkan berbagai aspek seperti pendapatan rendah, kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender, dan lingkungan hidup yang tidak baik. Bank Dunia menyatakan bahwa tidak memiliki cukup uang atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, dan perumahan serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu hal yang menyebabkan kemiskinan. Pengangguran seringkali terkait dengan kemiskinan, karena masyarakat yang miskin cenderung menghadapi keterbatasan kesempatan kerja, sementara tingkat pendidikan dan kesehatannya seringkali tidak memadai. Dengan demikian, masalah kemiskinan terkait erat dengan isu-isu seperti pengangguran, pendidikan, dan kesehatan, dan diperlukan pendekatan lintas sektor dan lintas aktor yang terintegrasi, terkoordinasi, dan terpadu (Romi & Umiyati, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

Masyarakat harus berkolaborasi untuk mewujudkan strategi bantuan kepada masyarakat miskin yang tepat, komprehensif, dan berjangka panjang. Selain itu, landasan pengentasan kemiskinan bangsa ini ditetapkan oleh Pasal 34 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “orang miskin dan anak terlantar diurus oleh negara”.

Suatu tempat harus mendapat terapi komprehensif yang mengatasi semua penyebab kemiskinan agar persentase kemiskinan di sana bisa diturunkan. Penerapan inisiatif pengentasan kemiskinan harus mempertimbangkan dan meningkatkan sejumlah bidang utama, termasuk menyeimbangkan dan menaikkan upah, meningkatkan pendidikan masyarakat, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan lapangan kerja merupakan aspek penting dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi. Faktor sosiokultural masyarakat dan ragam pengalaman kemiskinan turut berkontribusi terhadap kompleksitas permasalahan kemiskinan di Kota Cirebon (Ramadhan, 2017).

Hal ini untuk menghindari penafsiran kemiskinan berdasarkan standar yang berbeda. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Garis Kemiskinan yang terbagi menjadi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Paket komoditas kebutuhan pangan terdiri dari 52 kategori komoditas yang berbeda, dan 2.100 kilokalori per orang per hari merupakan nilai pengeluaran minimal kebutuhan pangan yang ditetapkan GKM. GKNM menetapkan ambang batas pengeluaran minimal untuk kebutuhan non-makanan seperti perumahan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Namun, Bank Dunia menggunakan dolar AS untuk menilai kemiskinan, dengan US\$ 1,9 sebagai jumlah harian per orang. Jika gaji seseorang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, maka ia dianggap miskin. Berikut ini adalah tabel informasi mengenai tingkat kemiskinan di Kota Cirebon :

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Miskin di Kota Cirebon Tahun 2008-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu)	Persentase Jumlah
-------	------------------------	-------------------

	Jiwa)	penduduk Miskin (%)
2008	47,40	14,11
2009	45,00	13,06
2010	35,50	12,00
2011	35,00	11,56
2012	33,20	11,10
2013	31,90	10,54
2014	30,60	10,03
2015	31,74	10,36
2016	30,15	9,73
2017	30,19	9,66
2018	28,03	8,88
2019	26,80	8,41
2020	30,61	9,52
2021	31,98	10,03
2022	31,47	9,82

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk mengalami fluktuasi, mencapai puncak pada tahun 2008 dan 2009, kemudian mengalami penurunan signifikan hingga tahun 2019. Sementara persentase penduduk miskin cenderung menurun sepanjang periode, dengan peningkatan kecil pada tahun 2021. Perlu diperhatikan faktor-faktor ekonomi dan kebijakan yang mungkin mempengaruhi tren ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, terdapat bahwa Cirebon menempati peringkat kesembilan dalam tingkat kemiskinan secara keseluruhan di Jawa Barat. Namun, menariknya, ketika mempertimbangkan hanya kota, Cirebon menduduki peringkat keempat dalam tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Menurut Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia bertugas untuk melindungi seluruh warga negaranya dan keturunannya, meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan pendidikan, dan membantu menegakkan hukum internasional berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial,

kemandirian, dan perdamaian abadi. Sesuai arahan Pembukaan UUD 1945, negara harus mengentaskan seluruh penduduknya dari kemiskinan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam Islam, kemiskinan dianggap sebagai ancaman terhadap akhlak, kejernihan berpikir, stabilitas keluarga, dan masyarakat. Ini dianggap sebagai musibah yang memerlukan perlindungan dari Allah SWT. terhadap potensi kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Penyebaran kemiskinan dapat membuat seseorang melupakan Allah SWT. dan mengurangi rasa sosial terhadap sesama. Oleh karena itu, Allah SWT. memerintahkan umat manusia untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki halal sebagai respons terhadap kemiskinan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung
“(Al-Jumu'ah : 10).

Dalam Tafsir Wajiz Riwayat Ibnu Hatim (Kemenag, 2020). Pada ayat ini Allah menjelaskan dorongan untuk bekerja supaya tidak miskin setelah selesai melakukan sholat jumat, umat islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat.

Pertumbuhan penduduk merupakan masalah utama bagi pembangunan ekonomi suatu wilayah karena ekspansi yang tidak terkendali dapat mempersulit pencapaian tujuan-tujuan seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Selain pengangguran, jumlah penduduk yang tinggi dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kuantitas dan kualitas yang pada akhirnya berdampak pada besarnya kemiskinan. Dalam jurnal Suhandi, dkk. (2018), Sukirno menyatakan bahwa bergantung pada variabel seperti perluasan pasar, pendapatan masyarakat, dan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dapat berkontribusi atau menghambat pengangguran. Fakta bahwa negara-negara dengan jumlah penduduk besar biasanya mempunyai tingkat kemiskinan yang

lebih tinggi menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang besar dapat memperburuk tingkat kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi merupakan tanda keberhasilan kemajuan, hal ini tidak selalu bermanfaat jika terjadi penurunan.

Informasi latar belakang Kota Cirebon periode 2008–2022 di atas menunjukkan adanya fenomena penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, memahami variabel-variabel yang mempengaruhi kemiskinan sangatlah penting. Untuk itu, “PENGARUH PENDUDUK DAN PENANGGURANGAN TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA CIREBON TAHUN 2008- 2022” menjadi proyek kajian yang tertarik untuk dilakukan oleh penulis.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih kurangnya lapangan pekerjaan hingga mengakibatkan banyaknya pengangguran.
2. Rendahnya pendapatan per kapita, suatu daerah dengan konsentrasi penduduk miskin yang tinggi mengalami penurunan daya beli masyarakat.
3. Terjadinya penutusan hubungan kerja / PHK yang di sebabkan oleh perusahaan.

C. Pembatasan Masalah

Untuk mencapai tujuan analitik, batasan masalah harus ditetapkan. Berikut ini contoh batasan masalah yang mungkin bisa digunakan:

1. Masih kurangnya lapangan pekerjaan hingga mengakibatkan banyaknya pengangguran.
2. Terjadinya penutusan hubungan kerja / PHK yang di sebabkan oleh perusahaan.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon Tahun 2008-2022?
2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon Tahun 2008-2022?
3. Apakah jumlah penduduk dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan secara simultan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak jumlah penduduk terhadap angka kemiskinan Kota Cirebon antara tahun 2008 - 2022.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengangguran terhadap angka kemiskinan Kota Cirebon pada tahun 2008 hingga tahun 2022.
3. Untuk menentukan sejauh mana jumlah penduduk dan tingkat pengangguran mempengaruhi jumlah kemiskinan pada saat yang bersamaan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Temuan penelitian ini diyakini akan menjadi sumber berharga bagi para pendidik, peserta didik, Program Studi Ekonomi Syariah, dan para peneliti itu sendiri. Hal ini juga mungkin berguna dalam meningkatkan pembelajaran siswa dan mempunyai dampak yang baik terhadap tingkat kemiskinan.

2. Manfaat praktis

- a. Penulis berkeyakinan bahwa kita dapat mengetahui secara pasti bagaimana pengaruh tingkat pengangguran dan jumlah penduduk di Kota Cirebon terhadap kemiskinan.
- b. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.
- c. Untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Cirebon, pemerintah berharap penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan dalam menentukan tindakan terkait pengangguran dan kependudukan.

G. Sistematika Penulisan

Garis besar justifikasi ini menggambarkan rangkaian kajian dalam bentuk bab-bab, sehingga dapat dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan, yang mencakup informasi latar belakang, dibahas dalam bab pertama. Konteks permasalahan tersebut memberikan justifikasi dan argumentasi atas pentingnya pemilihan topik kajian terkait dengan jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, rumusan masalah diperoleh dari pertimbangan dan justifikasi empiris yang berguna dalam membantu penulis mengidentifikasi permasalahan pokok, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka kerja, dan hipotesis penelitian dibahas pada bab kedua.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ketiga membahas tentang penelitian, meliputi data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan lokasi penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dan pembahasan dibahas dalam bab keempat.

BAB V PENUTUP

Bab kelima mencakup bab penutup, yang memberikan rekomendasi mengenai topik-topik yang berkaitan dengan penelitian serta kesimpulan terhadap kesulitan-kesulitan yang ada.